

CSP : hibridasi gagasan Freire dan Chambers

Tanggal : 14/02/2009

Oleh : Imron Rosidin (Musi Banyuasin, Februari 2009)

“Let a thousand flowers blooms (why only a thousand?, we can do more)”

(Robert Chambers)

Yang saya fahami dari apa yang disampaikan oleh Pak Soeksmono, ialah pertama, Community Settlement Plan (CSP) merupakan wahana sosial bagi komunitas untuk mencerna kondisi lingkungannya. Ada banyak hal, menyangkut banyak aspek, memerlukan pemahaman yang utuh, membutuhkan banyak kajian dan menuntut kelapangan waktu untuk membangunnya saat berbicara tentang CSP.

Kedua, perihal intervensi ilmu pengetahuan, dalam hal ini perihal kompetensi akademis dalam proses pendampingan CSP bagi masyarakat. Pak Soeksmono setidaknya menegaskan pentingnya intervensi pengetahuan untuk menjamin pemahaman yang utuh bagi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi-efektifitas- CSP bagi masyarakat.

Ketiga, kemampuan CSP untuk mewakili perencanaan pembangunan dari suatu komunitas yang benar-benar bersumber dari kebutuhan masyarakat, apapun itu kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan pembangunan komunitas memang multi aspek, tidak saja berhubungan dengan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap simpul-simpul aktifitas kehidupan seperti ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Aspek lainnya, perihal peningkatan mutu pelayanan pranata sosial dan optimalisasi peran kearifan lokal untuk meningkatkan keberdayaan masyarakatnya.

Keempat, mempertimbangkan ketiga hal di atas, lebih lanjut Pak Soeksmono membutuhkan ketegasan orientasi CSP yang tidak bersifat praktis saja, namun juga bersifat strategis. Artinya, ketegasan orientasi CSP perlu juga didukung oleh ketegasan

para pihak pengambil kebijakan program, diharapkan kedepannya CSP akan benar-benar menjadi model perencanaan konferhensif bagi pembangunan suatu komunitas

Saya mengira CSP memang telah menjadi masalah praktis saat fasilitator melakukan pendampingan perencanaan pembangunan komunitas. Metodologi pendampingan CSP seperti trans sectoral, focus group discussion, wawancara, angket dan serangkaian refleksi kondisi bersifat kolektif oleh komunitas nyatanya memang hal yang sangat praktis. Dengan varian metodologi, keterlibatan aspek afektif, psikomotorik, dan kognitif untuk mencerna dengan baik realitas lingkungannya, komunitas masyarakat di stimulus untuk membangun perencanaan pembangunan lingkungannya. Sampai disini CSP membuktikan dirinya sebagai metodologi, praktis aktifitas, wahana sosial yang mewakili tingkat kebutuhan pembangunan masyarakat yang untuk selanjutnya menjadi produk sosial berupa dokumen perencanaan pembangunan.

Pertanyaan kritisnya, apakah perkara pembangunan hanya melulu terkait dengan membangun dan mengembangkan prasarana dasar dan atau prasarana umum infrastruktur masyarakat dengan tidak mengindahkan ranah lain dari proses pembangunan komunitas?

* * *

Pembangunan, Kesadaran Freire dan kritik Chambers

Pembangunan masyarakat seutuhnya merupakan impian semua negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Pembangunan mewakili proses upaya negara untuk mensejahterakan masyarakatnya agar berkemampuan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Pembangunan menurut literatur-literatur ekonomi seringkali didefinisikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan dari peningkatan pendapatan riil perkapita melalui peningkatan jumlah dan produktivitas sumber daya. Dari pandangan itu lahir konsep-konsep mengenai pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi. Teori mengenai pertumbuhan ekonomi dapat ditelusuri setidak-tidaknya sejak abad ke-18. Menurut Adam Smith (1776) proses pertumbuhan dimulai apabila perekonomian mampu melakukan

pembagian kerja (division of labor). Pembagian kerja akan meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Adam Smith juga menggarisbawahi pentingnya skala ekonomi. Dengan meluasnya pasar, akan terbuka inovasi-inovasi baru yang pada gilirannya akan mendorong perluasan pembagian kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Setelah Adam Smith muncul pemikiran-pemikiran yang berusaha mengkaji batas-batas pertumbuhan (limits to growth) antara lain Malthus (1798) dan Ricardo (1917). Banyak lagi pemikiran-pemikiran ekonomi lainnya terkait dengan tujuan akhir yang hendak dicapai dari pembangunan.

Yang menarik adalah munculnya pemikiran-pemikiran baru perihal pembangunan, seperti Pandangan bahwa pembangunan tidak seyogyanya hanya memperhatikan tujuan-tujuan sosial ekonomi, berkembang luas. Masalah-masalah demokrasi dan hak-hak asasi manusia menjadi pembicaraan pula dalam kajian-kajian pembangunan (antara lain lihat Bauzon, 1992). Goulet, (1977) yang mengkaji falsafah dan etika pembangunan, misalnya, mengetengahkan bahwa proses pembangunan harus menghasilkan pertama, terciptanya "solidaritas baru" yang mendorong pembangunan yang berakar dari bawah (grassroots oriented). Kedua, memelihara keberagaman budaya dan lingkungan, dan ketiga, menjunjung tinggi martabat serta kebebasan bagi manusia dan masyarakat.

Pendekatan yang terakhir inilah yang membidani lahirnya paradigma baru pembangunan Menurut pendekatan ini, tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakatnya untuk menikmati kehidupan yang kreatif, sehat dan berumur panjang. Walaupun sederhana, tujuan ini sering terlupakan oleh keinginan untuk meningkatkan akumulasi barang dan modal. Banyak pengalaman pembangunan menunjukkan bahwa kaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tidaklah terjadi dengan sendirinya. Pengalaman-pengalaman tersebut mengingatkan bahwa pertumbuhan produksi dan pendapatan (wealth) hanya merupakan alat saja, sedangkan tujuan akhir pembangunan harus manusianya sendiri. Menurut pandangan ini tujuan pokok pembangunan adalah memperluas pilihan-pilihan manusia (Ul Haq, 1985). Pengertian ini mempunyai dua sisi. Pertama, pembentukan kemampuan manusia seperti tercermin dalam kesehatan, pengetahuan dan keahlian yang

meningkat. Kedua, penggunaan kemampuan yang telah dipunyai untuk bekerja, untuk menikmati kehidupan atau untuk aktif dalam kegiatan kebudayaan, sosial, dan politik. Paradigma pembangunan manusia yang disebut sebagai sebuah konsep yang holistik mempunyai 4 unsur penting, yakni: (1) peningkatan produktivitas; (2) pemerataan kesempatan; (3) kesinambungan pembangunan; serta (4) pemberdayaan manusia.

Lahirilah sudah gagasan baru, paradigma pembangunan yang berakar pada konsep demokrasi dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan; pemberdayaan masyarakat. Paradigma pembangunan ini meyakini bahwa permasalahan pembangunan merupakan permasalahan keterbatasan masyarakat negara terhadap asset dan akses apapun itu bentuknya dari negara untuk melakukan pembangunan.

Gagasan inilah yang meluruskan bias-bias pembangunan yang selama ini terjadi dalam proses pembangunan. **Bias pertama** adalah adanya kecenderungan berpikir bahwa dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya, dimensi material lebih penting daripada dimensi kelembagaannya, dan dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya. Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut jalan pikiran yang demikian. **Bias kedua** adalah anggapan bahwa pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah (grass-root). Akibatnya kebijakan-kebijaksanaan pembangunan menjadi kurang efektif karena kurang mempertimbangkan kondisi yang nyata dan hidup di masyarakat. **Bias ketiga** adalah bahwa pembangunan masyarakat banyak di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan material daripada keterampilan teknis dan manajerial. Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan sumber daya dan dana, karena kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengembangan sumber daya manusia, dan mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat di lapisan bawah.

Bias keempat adalah anggapan bahwa teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh lebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Anggapan demikian dapat menyebabkan pendekatan pembangunan yang, di satu pihak, terlalu

memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu untuk seluruh kawasan pembangunan di tanah air yang sangat luas dan beragam tahap perkembangannya ini. Di lain pihak, pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi teknologi tradisional yang dengan sedikit penyempurnaan dan pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi impor. **Bias kelima** adalah anggapan bahwa lembaga-lembaga yang telah berkembang di kalangan rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan menghambat proses pembangunan. Anggapan ini membuat lembaga-lembaga masyarakat di lapisan bawah itu kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, memperkuat serta memberdayakannya. Bahkan justru terdapat kecenderungan untuk memperkenalkan lembaga-lembaga baru yang asing dan tidak selalu sejalan dengan nilai dan norma masyarakat.

Bias keenam adalah bahwa masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang diperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya. Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan diberi petunjuk dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun yang menyangkut dirinya sendiri. Ini tercermin pada reaksi pertama terhadap program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang meragukan apakah tepat masyarakat miskin dipersilahkan memilih sendiri bagaimana memanfaatkan dana bantuan yang diperolehnya. Akibat dari anggapan ini banyak proyek-proyek pembangunan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi salah alamat, tidak memecahkan masalah, dan bahkan merugikan rakyat. Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek pembangunan. Bias ketujuh berkaitan dengan di atas, adalah bahwa orang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikian, cara menanganinya haruslah bersifat paternalistik seperti memperlakukan orang bodoh dan malas, dan bukan dengan memberi kepercayaan. Dengan anggapan demikian masalah kemiskinan dipandang lebih sebagai usaha sosial (charity) dan bukan usaha penguatan ekonomi.

Jelaslah sudah, berdasarkan paradigma baru ini, pembangunan ternyata tidak menunjuk pada usaha memenuhi kebutuhan prasarana dasar dan prasarana umum infrastruktur saja. Pembangunan sejatinya menuju pada peningkatan keberdayaan masyarakat atau komunitas untuk meluaskan akses dan meningkatkan asset sosial guna melakukan

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan lingkungannya. Keberdayaan masyarakat atau komunitas menjadi kata kunci dalam proses pembangunan. Keberdayaan meniscayakan pentingnya pembangunan potensi masyarakat dan lingkungannya. Sampai pada titik ini, membangun potensi masyarakat menjadi perihal yang tidak mudah untuk diwujudkan, banyak variabel terkait dengan usaha-usaha membangun keberdayaan masyarakat.

Paoulo Freire (1970) melakukan analisis yang menyatakan bahwa sistem kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, membuat masyarakat mengalami proses 'dehumanisasi'. Tentunya dehumanisasi yang ditunjuk oleh Freire dalam konteks pembangunan adalah tentang kesadaran atau pandangan hidup masyarakat terhadap diri mereka sendiri. Secara lebih rinci Freire menjelaskan proses dehumanisasi tersebut dengan menganalisis tentang kesadaran atau pandangan hidup masyarakat terhadap diri mereka sendiri. Freire menggolongkan kesadaran manusia menjadi: kesadaran magis (magical consciousness), kesadaran naif (naival consciousness) dan kesadaran kritis (critical consciousness).

Kesadaran magis, yakni suatu kesadaran masyarakat yang tidak mampu mengetahui kaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Misalnya saja masyarakat miskin yang tidak mampu melihat kaitan kemiskinan mereka dengan sistim politik dan kebudayaan. Kesadaran magis lebih melihat faktor diluar manusia (natural maupun supra natural) sebagai penyebab dan ketakberdayaan. Pada kondisi ini pembangunan dengan segala prosesnya akan berpusat kepada negara, baik perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaannya. Masyarakat tidak begitu memahami proses dan pelaksanaan pembangunan bagi diri dan lingkungannya, sebab pembangunan tidak berangkat dari kondisi senyatanya. Sedangkan **kesadaran naif** ialah keadaan yang di katagorikan dalam kesadaran ini adalah lebih melihat 'aspek manusia' menjadi akar penyebab masalah masarakat. Dalam kesadaran ini 'masalah etika, kreativitas, 'need for achevement' dianggap sebagai penentu perubahan sosial. Jadi dalam menganalisis mengapa suatu masyarakat miskin, bagi mereka disebabkan karena 'salah' masyarakat sendiri, yakni

mereka malas, tidak memiliki kewiraswataan, atau tidak memiliki budaya 'membangunan' dan seterusnya.

Kesadaran kritis lebih melihat aspek sistim dan struktur sebagai sumber masalah. Pendekatan struktural menghindari 'blaming the victims' dan lebih menganalisis untuk secara kritis menyadari struktur dan sistim sosial, politik, ekonomi dan budaya dan akibatnya pada keadaan masyarakat.

Membangun kesadaran kritis masyarakat atau komunitas seperti yang telah dikemukakan sebelumnya adalah tindakan utama dan pertama untuk melakukan proses pembangunan sejatinya. Memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk bersama-sama melihat dan merencanakan tindakan terbaik bagi diri dan lingkungannya, untuk selanjutnya merencanakan dan melaksanakan pembangunan lingkungan berdasarkan pemahaman dan penginderaan mereka. Seperti halnya apa yang telah dilakukan oleh fasilitator, social enterpreuner, dan atau pelaku pemberdayaan dalam mendampingi masyarakat. Seperti halnya pula yang telah dilakukan untuk membangun CSP bagi masyarakat yang pada prosesnya memerlukan kepekaan masyarakat untuk memahami dan melakukan perencanaan pembangunan. Semua proses ini tentunya hanya dilakukan oleh masyarakat dengan proses pendampingan berkelanjutan.

Pada praktiknya, pendampingan terhadap masyarakat memerlukan metodologi yang memungkinkan masyarakat atau komunitas untuk terlibat secara penuh untuk membangun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Participatory Rural Appraisal (PRA) yang digagas oleh Robert Chambers selanjutnya mengambil peran penting bagi upaya-upaya pembangunan yang memusatkan perhatiannya pada keberdayaan masyarakat.

Metoda PRA bertujuan menjadikan warga masyarakat sebagai peneliti, perencana, dan pelaksana program pembangunan dan bukan sekedar obyek pembangunan. Kritik **PRA terhadap pembangunan adalah bahwa program-program pembangunan selalu diturunkan "dari atas" (top down) dan masyarakat tinggal melaksanakan. Proses perencanaan**

program tidak melalui suatu "penjajagan kebutuhan" (need assesment) masyarakat, tetapi seringkali dilaksanakan hanya berdasarkan asumsi, survei, studi atau penelitian formal yang dilakukan oleh petugas atau lembaga ahli-ahli penelitian. Akibatnya program tersebut sering tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tidak adanya rasa memiliki terhadap program itu. Dengan PRA, yakni dengan partisipasi masyarakat keadaan itu diperbaiki dan juga keterampilan-keterampilan analitis dan perencanaan dapat dialihkan kepada masyarakat. Dengan demikian secara bertahap ketergantungan pada pihak luar akan berkurang dan pengambilan prakarsa dan perumusan program bisa berasal dari aspirasi masyarakat (bottom up). Metoda PRA didasarkan pada penyempurnaan dan modifikasi dari metoda AEA (Agroecosystems Analysis) dan RRA (Rapid Rural Appraisal) yang dilakukan oleh kalangan LSM dan peneliti yang bekerja di wilayah Asia dan Afrika. Walaupun ada beberapa kesamaan antara metoda PRA dan RRA, tetapi ada perbedaan secara mendasar. Metoda RRA penekannya adalah pada kecepatannya (rapid) dan penggalan informasi oleh orang luar. Sedangkan metoda PRA penekannya adalah pada partisipasi dan pemberdayaan. Chamber sendiri menyatakan PRA sebagai "Sekumpulan pendekatan dan metode yang mendorong masyarakat untuk turut serta meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka mengenai hidup dan kondisi mereka sendiri agar mereka dapat membuat rencana dan tindakan".

PRA terlahir dari kritik terhadap peneliti sosial (konvensional) yang selama ini dianggap menjadikan masyarakat sebagai obyek penelitian dan sumber informasi (yang tidak bisa mengakses hasil penelitiannya), untuk kepentingan peneliti dan orang luar saja, menyebabkan berkembangnya kalangan yang mengembangkan penelitian partisipatif.

Metodologi PRA bukan lagi hanya sekedar sebuah metodologi pengkajian dan perencanaan. Namun, pendapatnya ini ditentang oleh kalangan yang berpendapat lain: PRA masih belum bisa dikatakan sebagai suatu paradigma ataupun ideologi, karena belum membangun suatu kerangka pikir yang lengkap. PRA sebenarnya masih lebih banyak seperti posisinya yang awal: kumpulan metode atau teknik kajian yang dimaksudkan sebagai sebuah alternatif bagi penelitian sosial yang digunakan di kalangan NGO.

Pada buku pertamanya, Chambers memperkenalkan metode Rapid Rural Appraisal (RRA) sebagai alternatif bagi para praktisi pembangunan yang memerlukan sebuah metodologi ‘penelitian’ yang bisa membantu mereka memahami masyarakat secara cepat, dengan informasi aktual, dan biaya murah, serta bisa mengajak masyarakat sebagai pelaku penelitian itu sendiri.

Sedangkan pada bukunya yang kedua (Chambers: 1997), Chambers menggunakan istilah Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk menggantikan RRA. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa RRA dan PRA adalah bentuk aplikasi pemikiran Robert Chambers yang berkembang terus, terutama pemikiran tentang bagaimana seharusnya “orang luar” (para “profesional”) bekerja di masyarakat dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan dan pembangunan pedesaan. Di dalam buku keduanya itu, Chambers juga memaparkan asal-usul penggunaan istilah PRA, ternyata PRA sebenarnya adalah penamaan baru untuk RRA yang dikembangkan oleh kalangan NGO di Nepal, Kenya, dan India, pada pertengahan tahun 1980-an. Meskipun terdapat berbagai sumber PRA, nampaknya RRA adalah sumber yang paling langsung dengan PRA. PRA adalah bentuk metamorfosis RRA, sehingga PRA semula disebut sebagai ‘RRA partisipatif’. Kata ‘partisipatif’ masuk ke dalam kosa kata RRA itu, terjadi pada pertengahan tahun 1980-an.

Pada perkembangan berikutnya PRA menjadi metodologi pendekatan program yang lebih dari sekedar untuk proses pengkajian masyarakat, melainkan sebagai sebuah kerangka kerja pengembangan program partisipatif. Dalam pengertian ini, PRA dapat digunakan untuk kegiatan pengkajian (appraisal) baik untuk peninjauan kebutuhan (need assessment), perencanaan, pelaksanaan dan pendampingan masyarakat, sampai monitoring-evaluasi program, yang terintegrasi dalam keseluruhan siklus program pengembangan masyarakat (community development).

Robert Chambers merumuskan Tiga Pilar PRA dalam kaitan penggunaan PRA sebagai metodologi atau kumpulan metode pembelajaran dan bertindak untuk masyarakat. Tiga Pilar PRA ini bisa diintegrasikan ke dalam kerangka kerja pengembangan masyarakat

untuk mengembangkan proses-proses partisipatif dan pembelajaran bersama dalam setiap tahap program. Tiga pilar (unsur) utama PRA menurut Robert Chambers, yaitu:

1. Sikap-perilaku orang luar yang seharusnya berperan sebagai fasilitator, bukan mendominasi (seperti instruktur, penyuluh)
2. Metode-metode atau teknik-teknik PRA, sebagai alat untuk mengubah pendekatan searah (tertutup) menjadi pendekatan multi-arah (terbuka), pendekatan individu menjadi pendekatan kelompok, teknik belajar verbal (misalnya: ceramah) menjadi visual, dan teknik analisa dengan mengukur atau menghitung menjadi teknik membandingkan.
3. Berbagi (sharing) pengetahuan, pengalaman, informasi, dan sumberdaya lain, di antara orang luar dan masyarakat.

Selanjutnya Prinsip-prinsip PRA menurut Chambers adalah sebagai berikut.:

1. Pembalikan proses pembelajaran: belajar dari masyarakat lokal, di lokasi masyarakat dan dengan tatap-muka; bukan mengajari masyarakat, di ruangan yang memberi jarak pada kehidupan nyata masyarakat.
2. Belajar secara cepat dan bertahap: mengeksplorasi pengetahuan masyarakat, dengan menggunakan metode atau teknik secara fleksibel, secara improvisasi dan adaptif (tidak menggunakan langkah-langkah baku).
3. Mengatasi bias 'orang luar': mengatasi bias dengan bersikap santai dan informal (tidak terburu-buru), mendengarkan (bukan menceramahi).
4. Mengoptimalkan manfaat pembelajaran: mengoptimalkan jumlah dan akurasi pembelajaran, serta keterbatasan waktu.
5. Triangulasi dalam pembelajaran: pembelajaran dengan menggunakan variasi metode atau teknik, variasi jenis informasi, variasi kelompok atau individu peserta,

- dan variasi tempat, sehingga bisa melakukan cek-silang, membandingkan, dan memperkirakan kecenderungan suatu keadaan.
6. Mempertimbangkan kerumitan dan keberagaman: informasi, pengetahuan, dan pengalaman masyarakat bersifat rumit dan beragam, sehingga keberagaman perlu dihargai daripada merata-ratakan (generalisasi).
 7. Menyerahkan proses pada masyarakat: memfasilitasi proses pembelajaran, melakukan analisis, menyampaikan hasilnya, diserahkan secara bertahap kepada masyarakat.
 8. Mengembangkan proses penyadaran kritis: pihak luar selalu mengevaluasi secara kritis sikap-perilakunya sehingga bisa mengoreksi perilakunya yang mendominasi, meningkatkan kepekaan, dan meningkatkan pemahaman mengenai interaksi sosial yang terjadi karena pembelajaran.

Terdapat berbagai macam pendekatan (approachs) yang kita ketahui dalam melakukan pembangunan perumahan-pemukiman. Sebagai contoh misalnya, pendekatan formal – kelembagaan (the institution - formal), pendekatan formal – finansial (the financial - formal), pendekatan informal – sosiologis (the sociological - informal), pendekatan permintaan dan penyediaan (the demmand and supply), pendekatan kemampuan-menabung (the user affordability), pendekatan atas dasar kebutuhan dasar pengguna (the user basic need) dan lain sebagainya (Udjianto Pawitro,2007). PRA berkaitan dengan berbagai macam pendekatan pembangunan bagi masyarakat tetap memiliki “taste” yang unik dan khas sebab di dalam PRA sendiri mengenal beberapa prinsip untuk pengembangan masyarakat, diantaranya adalah belajar dari pengalaman masyarakat, berbuat bersama, menyeimbangkan atau mengurangi bias, membuka kesadaran baru, penemuan dan membangun rasa percaya diri, solidaritas membangun kemitraan serta memperkaya pengetahuan dan budaya lokal.

Beberapa hal tersebut memang penting jika berbicara pengembangan masyarakat. Disinilah dapat dilihat bagaimana PRA bukan saja mengakomodir seluruh pendekatan pembangunan bagi masyarakat, tetapi juga mampu memunculkan gagasan – gagasan baru baru metodologi dan pendekatan pembangunan bagi masyarakat, PRA seakan-akan memiliki kemampuan metamorfosis di tengah-tengah masyarakat. Dalam pelaksanaannya PRA perlu untuk dimulai dengan kegiatan sederhana dan kongkrit berjangka pendek yang dapat dirasakan atau memecahkan masalah. Pengalaman dari kegiatan tersebut dapat dikembangkan dan disempurnakan dalam berbagai kegiatan lain yang lebih kompleks, menuju mobilisasi kegiatan secara terpadu dan sistematis berjangka panjang. Metode PRA berawal dari gagasan atau rencana yang dikembangkan menjadi aksi dan disempumakan melalui refleksi.

PRA memang perlu dimulai dari kemampuan masyarakat, dimana ia berada dan apa yang telah dimiliki serta kebutuhan apa yang ingin dipenuhi. Masyarakat sesungguhnya memiliki potensi dan kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, meski kadang memang memerlukan sentuhan dan orang lain. Asumsi ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif berangkat dari “apa yang ada, bukan yang diada-adakan”. Selama ini banyak program pembangunan yang dirancang oleh para pakar, sambil berkelakar, di belakang meja gambar (rencana teknis) dan dibahas di meja bundar (penentuan kebijakan) tanpa banyak melibatkan masyarakat sekitar. Lain halnya dengan metode PRA yang berorientasi proses, melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat, melalui berbagai upaya belajar, melibatkan berbagai kalangan masyarakat (tua, muda, pria, wanita, miskin, kaya). Meskipun langkah-langkah dan teknik-teknik yang digunakan mungkin terlihat rumit, namun bila telah dipraktikkan akan terasa biasa. Sebab PRA merupakan sebuah siklus pembelajaran, pencerahan dan perubahan (M.Baiquni).

Sejauh ini PRA sebagai sebuah pendekatan praktis sekaligus rancangan metodologis bagi program pemberdayaan masyarakat masih relevan dan efektif mengawal nilai substansi pemberdayaan, langkah selanjutnya bagaimana kemudian kawasan kajian kolektifnya bersama masyarakat mampu dikembangkan lebih lanjut meliputi perihal-perihal teknik dalam kerangka kegiatan-pembangunan- infrastruktur. Sejauh ini pula PRA masih

difahami sangat parsial sebatas kajian-kajian focus group discussion yang berkelanjutan, kegiatan transect, pemetaan prasarana dasar yang kemudian dituangkan dalam peta tematik kawasan, sehingga kadang nilai esensialnya menjadi pudar.

Demikianlah perpotongan gagasan pembangunan atas dasar kesadaran kritis dan metodologi partisipatif terlahir. Kembali kepada CSP, jauh dari permasalahan praktik dilapangan, seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa memang CSP memang telah menjadi masalah praktis saat fasilitator melakukan pendampingan perencanaan pembangunan komunitas. Metodologi pendampingan CSP seperti trans sectoral, focus group discussion, wawancara, angket dan serangkaian refleksi kondisi bersifat kolektif oleh komunitas nyatanya memang hal yang sangat praktis.

Yang perlu difahami disini adalah, pertama, Kegiatan –pembangunan- infrastruktur sebagai salah satu aspek yang niscaya diperlukan untuk membangun kapasitas mumpuni masyarakat dalam menemukenali permasalahan, bersedia untuk melakukan dialog bersama realitas, lantas mensikapi realitas tersebut dalam bentuk kerja nyata yang mampu berimplikasi kepada peningkatan harkat kehidupan dan berkehidupan.

Kedua, memahamkan kegiatan –pembangunan- infrastruktur dalam upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat adalah bukan sebagai kegiatan pembangunan fisik saja. Pendidikan kritis yang memberikan indikator bahwa masyarakat bergerak dari kondisi berkesadaran magis (magical consciousness) menuju kesadaran naif (naival consciousness) lantas berujung pada kesadaran kritis (critical consciousness) dalam pembangunan fisik infrastruktur ditandai dengan kemampuan masyarakat melakukan manajemen (planning, organizing, actuating and controlling) proyek pembangunan bagi keterpenuhan prasarana dasar permukiman. Dalam konteks kondisi tersebut, teknisnya kadang –meskipun juga seringkali terjadi- memunculkan dilema tersendiri, kaitannya dengan kapasitas masyarakat untuk memenuhi kaidah-kaidah dasar perencanaan teknik (detail engineering design dan rencana anggaran biaya), standard operational procedure pekerjaan teknik dan kaidah – kaidah pelaporan administrasi yang disyaratkan di satu sisi dan sisi lainnya adalah urgensitas keterpenuhan prasarana dasar permukiman bagi

masyarakat yang kadangkala –ironisnya, disebabkan ketergesaan oleh waktu untuk mengakses sumber dana- menafikkan kaidah-kaidah teknik dan perencanaan tersebut.

Ketiga, membangun kesadaran kritis disadari benar memerlukan keterbukaan ruang serta waktu yang tidak terbatas, kecuali jika yang diharapkan hanyalah peningkatan kapasitas pada aspek psikomotorik dan afektif saja, dan jelaslah ranah kesadaran kritis mensyaratkan terjadinya peralihan dinamis aspek kognitif. Peningkatan aspek kognitif memungkinkan masyarakat memaknai keseluruhan proses pemberdayaan, pun saat proses pemberdayaan menemukan kebuntuan sesaat dalam perjalanannya. Memaknai nilai bukan saja dari hal yang bersifat material dan kasat mata, melahirkan gagasan-gagasan kritis bagi realitas yang terjadi, akhirnya tumbuh berkembangnya tindakan-tindakan ke-karya-an untuk produktifitas hidup dan berkehidupan masyarakat niscaya menjamur dalam kesadaran kolektif.

Sumber:

www.rekompakjrf.org/?act=detailartikel&id=17